

ABSTRAK

Transaksi Elektronik sebagai Perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan Media Komputer maupun media Telekomunikasi memberikan kemudahan bagi Masyarakat di Zaman sekarang. Tak tertinggal pula pada Dunia Notaris yang mulai memanfaatkan Perkembangan Teknologi. Diantaranya dengan diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berkaitan dengan Permohonan untuk memperoleh Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara elektronik. Dengan adanya kemajuan di Bidang Teknologi Informasi tersebut timbullah kemungkinan terhadap kemungkinan diberlakukannya Akta Notaris secara Virtual (secara elektronik) misalnya yang di keluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. **Tujuan:** Mendeskripsikan Kajian Hukum, Pelaksanaan, dan Kendala Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (AHU).

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Pendekatan Yuridis Normativ yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan Masalah Penelitian dengan Meneliti Data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan Penelitian terhadap Data Primer. Jenis Data yang digunakan berupa Data Primer dan Data Sekunder.

Hasil: Notaris sebagai Pejabat yang menjalankan sebagian dari Fungsi Negara wajib memberikan Pelayanan Publik maksimal dalam Pelayanan di Bidang Hukum. Melalui Peran Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Notaris diberi kemudahan dalam menjalankan tugasnya terkait Pembuatan Akta Secara Elektronik melalui Aplikasi AHU Online. Walaupun Telah diberikan Kemudahan dalam Pelayanan Publik, Masih terdapat kendala dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Elektronik, yang diantaranya Permasalahan Server yang sering Down dan Sumber Daya Manusia yang belum kopeten untuk menjalankannya. **Simpulan:** Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronok Tidak menyalahi Peraturan dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang-undang lainnya. Pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik di terapkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dalam proses pelaksanannya ada beberapa kendala yang diperoleh yaitu kendala oada Server, dan Kendala kesiapan SDM. **Saran:** Perlu adanya perbaikan Sistem Keamanan pada Sistem Jaringan sehingga tidak mudah diretas oleh para Hacker; Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap penyedia layanan sistem AHU Online, sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal saat proses Input Data; dan Perbaikan dan peningkatan Sistem Server sehingga tidak terjadi server down di jam-jam pelayanan kantor.

Kata Kunci: Akta Elektronik, Notaris, AHU Online

ABSTRACT

*Electronic Transactions are legal actions conducted using computer and telecommunications media. In this day, electronic transactions have made it easy for the community. This also applies to notaries who began to take advantage of technological developments. The Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) relating to applications for obtaining a Legal Entity Company Legal Approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia is an example of the use of technology. Advances in Information Technology in the system made it possible to implement the Notary deed in a virtual (electronic) manner for example issued by the Director General of General Law Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. **Objective:** Describe the legal, implementation and obstacle study of electronic notary deed issued by the Directorate General of General Law Administration of the Ministry of Law and Human Rights.*

***Research Methods:** The research method used in this writing is a Juridical Normative approach, which is a method used to solve research problems by researching secondary data first and then proceed with conducting research on primary data. The type of data used is Primary Data and Secondary Data.*

***Result:** Notary as officer who runs part of the state function is required to provide maximum public services in legal services. Notary, through the role of the Directorate General of General Law Administration, was given the convenience in carrying out his duties related to the making of deed electronically through the AHU Online Application. Although Ease of Public Service has been given, there are still obstacles in the implementation of Electronic Deed Making, which include server problems that are often down and human resources who have not been competent to run the application. **Conclusion:** Electronic Notary Deed Making does not violate the Regulations and in accordance with applicable Laws based on Law Number 25 Year 2009 and other Laws. The electronic Notary deed making is implemented in the context of improving public services. The implementation process does indeed have several obstacles, namely the constraints on the server, and the readiness of the human resources. **Suggestion:** It is necessary to improve the security system on the network system so that it is not easily hacked by hackers; Improved human resources for AHU Online system service providers, so that they can provide maximum service during the data input process; and repairing and upgrading the server system so that there is no server downtime during office service.*

***Keywords:** Electronic Deed, Notary, AHU Online*